

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN UMKM PADA DESA WISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

*Theresya Wulandani Putri
NPP.31.0760*

*Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: wulandaritheresia62@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The poverty rate is high and increasing in West Lombok Regency. Until now, poverty is still relatively high even though the government is trying to reduce poverty by implementing a number of policies that can overcome the problem of poverty. **Purposive:** This research aims to find out how policies are implemented, as well as to find out the driving and inhibiting factors as well as efforts that can be made to overcome the inhibiting factors. In determining the success of policy implementation, researchers use Knill and Tosun's theory, where in this theory researchers can measure the success of implementation based on accuracy, policy instruments, policy design, structural control, institutional design, administrative capacity and social acceptance. **Method:** In this research, interview, observation and documentation research methods were used with data analysis techniques assisted by Nvivo software to process the data. **Research Results:** From the research results it is known that policy implementation has gone well. Several driving factors are government coordination, application-based creative economy, community empowerment and the potential of UMKM. Meanwhile, the inhibiting factors are the production and distribution process, people's mindset, understanding of technology, other causes of poverty such as lack of employment opportunities, legality, lack of human resources, and institutions. **Conclusion:** In the implementation of the poverty reduction policy, it has been carried out well, aimed at implementing the program in accordance with the indicators of successful policy implementation.*

Keywords: *Implementation, Policy, Poverty, Development, UMKM*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Angka kemiskinan yang tinggi dan semakin bertambah di Kabupaten Lombok Barat . Hingga saat ini kemiskinan masih terbilang tinggi meskipun pemerintah berupaya mengurangi kemiskinan dengan cara menerapkan sejumlah kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, juga untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat. Dalam penentuan keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti menggunakan Teori Knill dan Tosun dimana dalam teori tersebut peneliti dapat mengukur keberhasilan implementasi melihat dari ketepatan, instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial. **Metode :** Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang dibantu software Nvivo untuk mengolah datanya. **Hasil penelitian :** Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Beberapa faktor pendorong yaitu koordinasi pemerintahan, ekonomi kreatif berbasis aplikasi, pemberdayaan masyarakat dan potensi UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu proses produksi dan distribusi, mindset masyarakat, pemahaman teknologi, penyebab kemiskinan lain seperti kurangnya lapangan pekerjaan, legalitas , kurangnya SDM, dan kelembagaan. **Kesimpulan :** Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan telah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan terlaksananya program sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan, Pengembangan, UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Royat,2015). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Namun, hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Provinsi

Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar provinsi dengan presentase kemiskinan yang tinggi yaitu sebesar 14,23%. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan ke 8 (delapan) setelah Bengkulu pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan untuk menurunkan angka presentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan presentase kemiskinan tinggi dan masih di atas rata-rata nasional dan menjadi salah satu daerah yang memiliki presentase jumlah angka kemiskinan yang tinggi di NTB dibandingkan dengan kabuapten/kota lainnya. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah dengan progres paling rendah dalam penanganan kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya karena terjadi pelambatan penurunan presentase kemiskinan yang disebut oleh Kepala BPS Lombok Barat Bapak Ir. Lalu Supratna sebagai penurunan presentase kemiskinan yang tidak stabil terlebih lagi pada tahun 2021 terjadi peningkatan presentase kemiskinan hingga angka 14,47%.

Presentase kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Barat sebesar 13,39%, turun dari capaian angka kemiskinan Tahun 2021 sebesar 14,47%. Capaian pada Tahun 2022 ini turun sebesar 1,08% dari angka kemiskinan pada tahun 2021, dan persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 ini sudah lebih baik dari capaian Provinsi NTB dengan tingkat kemiskinan Tahun 2022 mencapai 13,68%, namun masih berada di atas capaian rata-rata Nasional sebesar 9,54%.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Keduanya dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam lapisan ekonomi rendah. Keberadaan UMKM terbukti mewujudkan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. UMKM merupakan *leader* perekonomian daerah maupun nasional. Pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital. Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro maupun mikro (Kadeni dan Srijani 2020).

1.2.Kesenjangan Masalah Penelitian (Gap Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM ini yaitu berkaitan tingginya angka presentase kemiskinan ditengah tingginya potensi UMKM dan desa wisata di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi UMKM dan desa wisata yang tinggi dibuktikan dengan saat ini terdapat sejumlah 60 desa wisata yang tercatat pada data BPS Lombok Barat pada tahun 2022. Jumlah ini akan dipastikan terus meningkat mengingat peran desa wisata yang begitu besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada sejumlah desa wisata yang menjadi “ Top 10 Desa Wisata Terbaik” di Kabupaten Lombok Barat bahkan beberapa diantaranya masuk ke dalam *Sustainable Tourism Observatorium (STO)* oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2020 (Dinas Koperasi dan UKM, 2020). Hal ini menunjukkan terdapat potensi yang besar dalam UMKM pada desa wisata di Kabupaten Lombok Barat, namun pada kenyataannya jumlah angka presentase kemiskinan masih terbilang tinggi. Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan penurunan jumlah UMKM. Selama kurun waktu 2018-2022 jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga menyebabkan jumlah penurunan presentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang sangat kecil dibandingkan dengan presentase dan jumlah kemiskinan saat jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Barat tinggi yaitu pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan UMKM adalah salah satu faktor pendorong dalam penurunan presentase kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat dan menyumbang 97% tenaga kerja (RPJPD 2023) .

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam hal implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan maupun pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif. Penelitian Masrun (2020) Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Kewirausahaan UKM Bidang Pariwisata Di Kawasan Pesisir Pantai Cemara Lembar Kabupaten Lombok Barat, menemukan bahwa melalui pelatihan dan pembinaan masyarakat telah membawa perubahan yang meningkat pada pengembangan wirausaha dan UKM , walaupun tidak signifikan dari kondisi sebelum dengan sesudahnya. Penelitian Wahyu Eka Satria (2018) implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis ekonomi kreatif, menemukan bahwa dalam implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan

menengah berbasis ekonomi kreatif, aspek sumber daya yang dimiliki oleh dinas koperasi, usaha mikro, dan perdagangan kota batu harus memiliki sumber daya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, serta sumber daya anggaran yang cukup memadai dalam menjalankan implementasi program. Penelitian Ari Muliarta Ginting (2017) Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa salah satu penghambat ekonomi kreatif diantaranya adalah aspek keuangan dan permodalan dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemberdayaan masyarakat. Penelitian Ida Bagus Eka Artika,dkk (2020) Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan Melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan bahwa diperlukan strategi untuk mengatasi kelemahan yang ada pada masyarakat. peningkatan kapasitas kelompok melalui pendampingan untuk mendapatkan program pemberdayaan oleh pemerintah. Penelitian Azhar Amir dkk (2020) Implementasi Program Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menemukan bahwa Terdapat aspek atraksi dan aksesibilitas baik untuk mendukung dan pengembangan desa wisata dengan nilai sektor masing-masing. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum optimal untuk mendukung keberlanjutan desa wisata. Sukirman (2021) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kabupaten Bandung dimana Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Yuni Catur Wulan dkk(2019) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Kota Purbolinggo dimana, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan kemiskinan di Kota Probolinggo berdasarkan data-data yang diperoleh. Atma (2013) Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan dimana kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, social, budaya dan politik. Fidianing dkk (2020) Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dimana Fenomena kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, tidak terkecuali

Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang menangani masalah kemiskinan didaerahnya dengan menetapkan ladasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengentasan Kemiskinan. Asna (2012) Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo dimana kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Muchlis Hamdi (2014) Implementasi Kebijakan Sistine Perizinan Online dimana berisi tentang bagaimana suatu implementasi dapat berjalan dengan baik ditentukan oleh sejumlah indikator.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik tentang kemiskinan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sering dibahas dan memperlihatkan bahwa sudah ada beberapa penelitian yang mengaitkan bagaimana peran pemberdayaan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan dan juga implementasi kebijakan. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan mendasar yang memperlihatkan perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti meskipun sama-sama membahas peran pemberdayaan masyarakat namun juga akan dihubungkan dengan potensi daerah. Perbedaannya terletak pada metode yang akan digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan triangulasi metode dan sumber dengan tujuan menguatkan dan meningkatkan nilai keakuratan suatu data.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM pada desa wisata di Kabupaten Lombok Barat beserta dengan faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

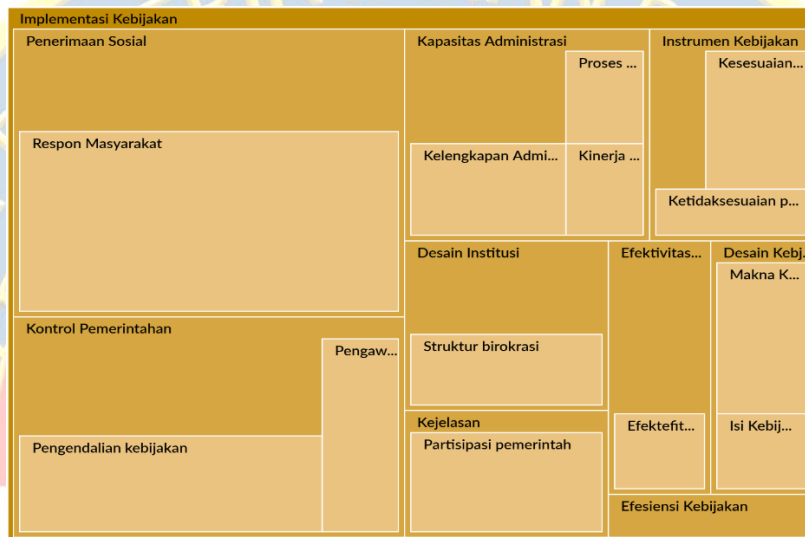
III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi NVivo 14. Aplikasi Nvivo 14 adalah software analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh *Qualitative Solution and Research*

(QSR) *International*, yaitu suatu perusahaan internasional pertama pengembang software untuk analisis data kualitatif (Bandur, 2016). Hasil analisis implementasi kebijakan dapat dilihat pada beberapa subbab berikut.

3.1.1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM Pada Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Barat

Peneliti melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan software Nvivo 14 untuk memetakan jalannya implementasi yaitu sebagai berikut.



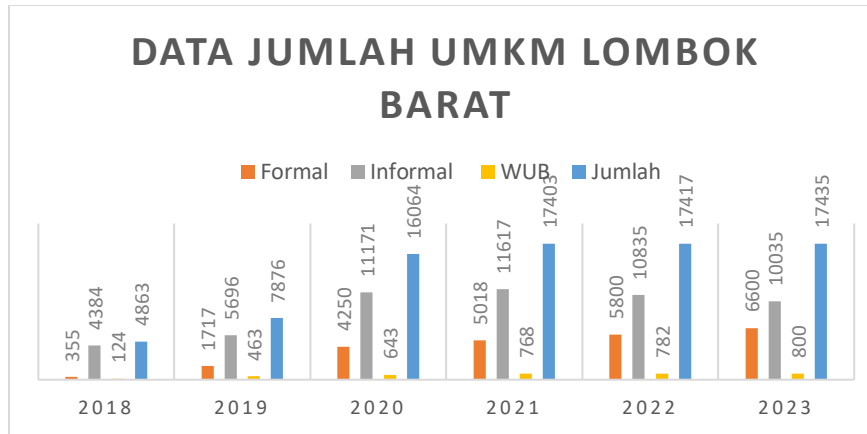
Sumber : diolah penulis

Gambar 1. Hierearki Chart Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan gambar diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM pada beberapa desa wisata di Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa indikator yang menjadi topik yang diperlihatkan oleh data yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan dan kejelasan
 - a. Ketepatan

Ketepatan kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2022

Gambar 2. Jumlah UMKM

Gambar di atas menunjukkan data yang merepresentasikan jalannya efektifitas dan efesiensi suatu kebijakan.

- Efektivitas kebijakan

Efektifitas kebijakan berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di masyarakat. Efektifitas merupakan salah satu kriteria implementasi berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan UMKM pada desa wisata dengan upaya ekonomi kreatif telah berhasil menurunkan presentase kemiskinan di Lombok Barat meskipun persentasenya masih tinggi. Hal lainnya terlihat dari mulai meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui usaha mandiri yang semakin diminati masyarakat yang terlihat pada peningkatan jumlah usaha baru dan pelaku UMKM di Lombok Barat.

- Efesiensi kebijakan

Efesiensi kebijakan mengacu pada kemampuan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks kebijakan publik, efesiensi sering kali diukur dengan membandingkan antara hasil yang diharapkan dari kebijakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM telah berjalan dengan efisien karena memanfaatkan sumber daya berupa masyarakat itu sendiri dalam pengembangan UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin

banyaknya masyarakat yang tertarik untuk berusaha sehingga meningkatnya jumlah wirausaha baru.

b. Kejelasan

Pada hakikatnya kejelasan suatu kebijakan dapat diketahui dengan melihat bagaimana proses jalannya kebijakan tersebut. Terdapat beberapa atribut yang menentukan kejelasan dan ketepatan yaitu kepatuhan dan partisipasi para pemangku kepentingan yaitu sebagai berikut :

- Kepatuhan

Kepatuhan dalam kejelasan kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh para pemangku kepentingan dan dapat diimplementasikan dengan tepat oleh pelaksana. Kebijakan yang jelas memiliki karakteristik yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan memberikan petunjuk yang jelas tentang kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan dengan jelas oleh para pemangku kepentingan dilihat dari sering dilaksanakannya program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM seperti sosialisasi dan pengembangan keterampilan sesuai pada kebijakan yang ada.

- Partisipasi pemangku kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam memastikan kejelasan kebijakan, karena hal ini memungkinkan untuk memperbaiki dan memperjelas kebijakan sebelum diimplementasikan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Sejauh yang peneliti amati terdapat banyak bentuk partisipasi pemangku kepentingan yang juga mencerminkan kepatuhan dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan berkaitan dengan kesesuaian jalannya kebijakan, dimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat salah satu caranya dengan ekonomi kreatif pengembangan UMKM yang diutamakan untuk masyarakat kurang mampu atau prasejahtera. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana masyarakat diberikan kemudahan untuk meningkatkan kemampuan berusaha dengan bantuan dari pemerintah berupa

permudahan izin, pemberian fasilitas sarana dan prasarana, pengembangan ketrampilan dan sebagainya untuk membantu masyarakat menciptakan peluangnya sendiri.

3. Desain Kebijakan

Desain kebijakan salah satu proses yang penting dalam membuat suatu kebijakan publik. Dalam hal ini desain kebijakan akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat dari isi dan makna kebijakan.

- Isi kebijakan

Desain kebijakan juga berkaitan dengan isi kebijakan yang membahas mengenai penanggulangan kemiskinan. Peraturan Bupati No.44 Tahun 2022 mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan berisi cara-cara yang diatur pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan tujuannya. Salah satunya adalah terkait pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan UMKM. Isi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM melalui program ekonomi kreatif diwujudkan melalui pembentukan aplikasi bernama Si Tebel yang digunakan oleh pelaku UMKM maupun masyarakat dalam kegiatan jual beli maupun komunikasi. Aplikasi ini adalah suatu perwujudan dari isi kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk memanfaatkan UMKM sebagai potensi utama dalam penurunan presentase kemiskinan.

- Makna Kebijakan

Makna kebijakan dalam instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan melibatkan rangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang membutuhkan dalam masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dengan saran media elektronik. Media elektronik menjadi penting untuk memaksimalkan pengembangan UMKM dan meningkatkan potensi pasar UMKM sehingga mampu bersaing dengan produk milih perusahaan swasta lainnya.

4. Kontrol Struktur Pemerintahan

Kontrol Struktur pemerintahan berkaitan erat dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses pelaksanaan kebijakan.

- Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan melakukan control pada situs transaksi online aplikasi Si

Tebel untuk memantau proses jual beli UMKM, potensi dan juga kendala dalam UMKM. Selain itu adanya aplikasi perizinan yang untuk mempermudah proses legalisasi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan mengamati produk UKM dan pelaku UKM secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui data perkembangan jumlah pelaku UKM, kendala serta produk UKM.

- Pengendalian

Bentuk pengendalian pemerintah berupa pemeberian modal dalam bentuk sarana dan prasarana mauapun barang lainnya yang bebas dikembangkan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan namun dengan syarat masyarakat tidak boleh menjual atau menghilangkan modal utama atau sarana prasarana yang diberikan, dalam hal ini juga akan dilakukan proses administrasi sebagai persyaratannya yang berkaitan dengan identitas pribadi, izin dan hal pendukung lainnya seperti surat keterangan tidak mampu dan sejenisnya.

5. Desain Institusi

Desain instiusi yaitu terkait struktur organisasi pemerintahan itu sendiri yaitu bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Hal ini berkaitan dengan pembuatan aturan, kebijakan, dan prosedur yang membentuk bagaimana suatu institusi akan beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur organisasi berkaitan dengan tatanan organisasi yang juga berkaitan dengan desain instutusi. Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana desain institusi mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM dengan ekonomi kreatif. Pada dasarnya desain institusi terkait Dinas Koperasi dan UKM sebagai dinas yang memiliki peranan penting dalam pengembangan UMKM. Dalam hal ini pengembangan UMKM dilakukan juga dengan menerapkan surat himbauan dari Bupati Nomor 440/260/ADM.EKO/2020 yang berisi himbauan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berbelanja di UMKM. Selain itu, himbauan tersebut juga berisi himbauan membuka gerai pemasaran produk UMKM di Gem Pearls, yaitu suatu kawasan di Desa Wisata Meninting sebagai salah satu daerah khusus pemasaran UMKM. Hal ini juga termasuk menyiapkan *platform* pemasaran digital denga e Lapak Si Tebel.

6. Kapasitas Administrasi

Kapasitas administrasi berkaitan dengan ketangkasan proses dan kinerja

administrasi. Dalam hal ini dalam pelaksanaann implementasi kebijakan dapat dilihat dari sisi administrasi dalam hal pelaksanaanya.

- Ketangkasan proses administrasi

Ketangkasan proses administrasi dalam kapasitas administrasi kebijakan merujuk pada kemampuan sistem administrasi untuk menangani berbagai tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kebijakan dengan cepat, efisien, dan efektif. Proses dan kelengkapan administrasi tentu sangat penting dalam program pengembangan UMKM. Hal tersebut meliputi syarat administrasi seperti pada proses legalisasi atau perizinan berusaha yang digunakan sebagai salah satu syarat pendukung dalam pengembangan UMKM. Dalam hal proses adminitrasi dan kinerja administrasi sudah berjalan dengan baik dengan adanya sistem perizinan secara online dan adanya pemasaran elektronik bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan ekonomi kreatif berbasis aplikasi Bernama aplikasi Si Tebel.

Perizinan berusaha memiliki kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa perizinan berbasis resiko yang di terapkan di Kabupaten Lombok Barat menggunakan empat tingkatan yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

- Kinerja Administrasi

Kinerja administrasi dalam kapasitas administrasi kebijakan merujuk pada seberapa baik sistem administrasi dapat melaksanakan tugas-tugas terkait dengan implementasi kebijakan. Dalam hal ini sistem yang dilakukan dengan upaya penerapan sistem *door to door* dalam pelaksanaan perizinan usaha dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan berusaha. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan UMKM Ibu Syaidah S.E pada wawancara yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM yang mengungkapkan bahwa dalam hal perizinan berusaha diperlukan tindakan ekstra dalam memudahkan proses administrasi perizinan termasuk secara *door to door*.

7. Penerimaan Sosial

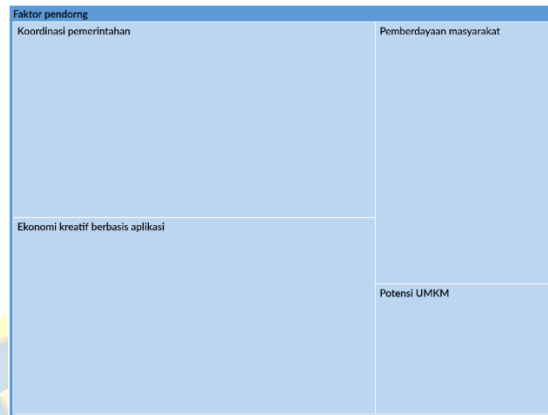
Penerimaan sosial berhubungan dengan bagaimana respon masyarakat sebagai atas kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini penerimaan sosial atau respon masyarakat menjadi hal yang paling penting dalam mengamati apakah suatu kebijakan sudah berjalan dengan

baik atau belum. Hal ini terlihat dari hirearki chart hasil olah data Nvivo yang menunjukkan peran besar respon masyarakat terhadap jalannya implementasi. Kebanyakan dalam tanggapan masyarakat memang tidak mengetahui bentuk kebijakan yang dijalankan, namun mereka merasa program-program yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan terutama adanya sosialisasi dan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat yang ingin membuka usaha. Namun, banyak kendala di masyarakat yang menyebabkan adanya hambatan terkait program terutama mindset masyarakat terkait perizinan yang merupakan hal pokok dalam pengembangan UMKM selain pelaksanaan sosialisasi dan juga pengembangan keterampilan masyarakat. Respon masyarakat masih rendah terkait hal tersebut karena anggapan bahwa hal tersebut masih terbilang tidak begitu penting untuk mereka.

Indikator-indikator tersebut sesuai dengan indikator pada teori Knill dan Tosun dimana setiap indikator terdapat dalam data penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini hal ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan telah berjalan dengan baik di Kabupaten Lombok Barat, dimana sejumlah indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan menyebutkan kondisi yang cukup baik bahkan sangat baik pada beberapa indikator keberhasilan implementasi terutama pada bagian penerimaan sosial berupa respon masyarakat, meskipun bentuk respon masyarakat juga ada yang berbentuk kendala yang dialami masyarakat .

3.2. Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM Pada Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Barat

Peneliti mendapati beberapa faktor pendorong dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM Pada Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Barat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo yang memetakan data wawancara, observasi dan dokumentasi menjadi grafik hirearki yang menunjukkan faktor pendorong dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut;



Sumber: diolah penulis,2023

Gambar 3. Faktor Pendorong

Berdasarkan gambar tersebut terdapat empat faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM yaitu :

1. Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan adalah salah satu faktor pendorong dalam implementasi kebijakan karena berperan untuk menghubungkan dan penyalarsan jalannya pemerintahan, baik dari pemerintah daerah kepada dinas, pemerintah kepada masyarakat dan dinas kepada masyarakat

2. Ekonomi Kreatif berbasis aplikasi

Ekonomi kreatif berbasis aplikasi maksudnya adalah menggunakan gagasan kreatif dalam pengembangan UMKM melalui aplikasi Si Tebel. Aplikasi ini memungkinkan pelaku UKM untuk mempermudah akses dalam menjalankan produksi maupun distribusi produk UMKM.

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, dimana pemberdayaan masyarakat mengarah pada pengembangan UMKM.

4. Potensi UMKM

Potensi UMKM juga termasuk faktor pendorong karena Kabupaten Lombok Barat memiliki peluang besar terhadap perkembangan UMKM pada desa wisata. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lombok Barat adalah daerah wisata yang memiliki banyak desa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik local maupun mancanegara.

3.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM Pada Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo yang memetakan data wawancara, observasi dan dokumentasi menjadi grafik hirarki yang menunjukkan faktor pendorong dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut;



Sumber: diolah penulis, 2023

Gambar 4. Faktor Penghambat

Berdasarkan gambar di atas terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM yang mempengaruhi keberhasilan jalannya kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses produksi dan bahan baku

Proses produksi adalah salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan UMKM.

2. *Mindset* masyarakat

Kendala lainnya adalah *mindset* masyarakat terkait perlunya pengembangan keterampilan dan sosialisasi terkait UMKM. Pemahaman tersebut masih rendah pada masyarakat, utamanya masyarakat golongan prasejahtera dari rentan usia dewasa hingga lanjut usia.

3. Pemahaman teknologi

Teknologi juga selain menjadi faktor pendorong namun pada beberapa sisi juga menjadi faktor penghambat, terutama pada masyarakat yang buta teknologi yaitu mereka yang berusia lanjut atau generasi tahun 1980 an ke bawah. Daya serap akan teknologi berkurang

untuk masyarakat kelahiran tahun 90an ke bawah, berbeda dengan masyarakat kelahiran tahu 2000an.

4. Penyebab kemiskinan yaitu pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan

Permasalahan kemiskinan berupa pengangguran dan kurangnya lapangan kerja mejadi tujuan utama dalam program pengembangan UMKM. Kurangnya lapangan pekerjaan tent uterus menjadi hambatan dalam penanggulangan kemiskinan.

5. Legalitas

Legalitas menjadi salah satu hal yang menghambat jalannya implementasi karena program yang dijalankan tidak bisa berjalan secara optimal. Legalitas terkait dengan perizinan berusaha yang menjadi salah satu indicator dalam pengembangan UMKM.

Tabel 1.

Jumlah usaha formal dan nonformal pada tiap desa wisata di Kabupaten Lombok Barat

No	Desa Wisata Tiap Kecamatan	Jumlah UMKM		Jumlah
		Formal	Nonformal	
1	Batulayar	809	462	1271
2	Gunungsari	797	923	1720
3	Lingsar	731	1514	2245
4	Narmada	741	1115	1856
5	Kediri	531	1689	2220
6	Kuripan	537	324	861
7	Labuapi	710	1457	2167
8	Gerung	676	1601	2277
9	Lembar	670	669	1339

10	Sekotong	398	281	679
Total		6600	10035	16635

Sumber : dinas koperasi dan UKM , 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total sebanyak 16.635 UMKM yang ada di Kabupaten Lombok Barat ada 10.035 yang berstatus non formal atau belum memiliki izin, sedangkan 6.600 lainnya bersifat formal. Hal ini berarti lebih dari 65% UMKM belum memiliki legalitas.

6. Kurangnya sumber daya manusia

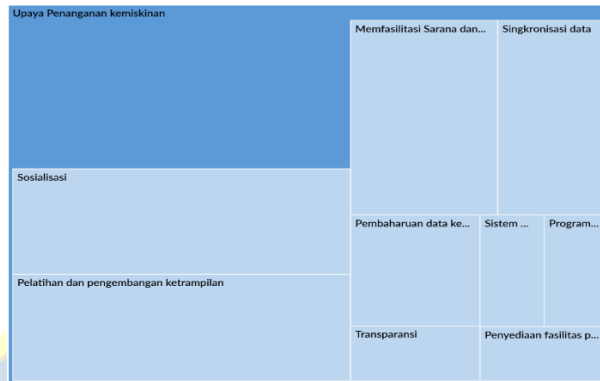
Kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya aparatur pada dinas Koperasi dan UKM. Pelaksanaan pembekalan ketrampilan dan sosialisasi dilakukan dua sampai tiga kali satu bulan, bahkan untuk pembekalan keterampilan dilakukan beberapa kali dalam setahun di beberapa desa tertentu yang memang ingin melaksanakan sosialisasi dan pembekalan keterampilan.

7. Kelembagaan

Kelembagaan adalah memiliki peran penghambat paling kecil dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui UMKM. Hal yang berakibat dengan kelembagaan yang menghambat program pengembangan adalah terkait proses pelaksanaan dan pendanaan dari Lembaga terkait yang berperan dalam pengembangan UMKM.

3.4. Upaya pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreaif pengembangan UMKM pada desa wisata di Kabupaten Lombok Barat

Melalui penelitian ini yang melibatkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, ada beberapa upaya telah diidentifikasi untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat dengan memanfaatkan data hasil penelitian menggunakan aplikasi Nvivo dalam pelaksanaan Program Pengembangan UMKM di Kabupaten Lombok Barat, yaitu sebagai berikut:



sumber: diolah penulis, 2023

Gambar 5. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Berdasarkan gambar hasil olah data Nvivo di atas dapat dilihat ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan UMKM.

2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan

Pelatihan dan pengembangan keterampilan adalah salah satu upaya yang dapat mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan melalui program pengembangan UMKM.

3. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah dengan perbaikan maupun pemberian sarana dan prasarana.

4. Pembaharuan data kemiskinan per desa wisata

Hal lainnya yang dapat dilakukan untuk upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan adalah pembaharuan data berupa sinkronisasi data kemiskinan antar dinas maupun lembaga yang terkait dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam program UMKM.

5. Penyediaan fasilitas pengembangan UMKM

Penyediaan fasilitas UMKM sebenarnya berkaitan dengan sarana dan prasarana, hanya saja pemberian fasilitas yang dimaksud mengarah kepada fasilitas kemudahan perizinan,

kemudahan berdagang, hak-hak pelaku usaha yang dapat menolong pelaku usaha

6. Sistem *door to door*

Salah satu yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan UMKM adalah terkait respond masyarakat terkait perizinan berusaha.

7. Transparansi

Hal yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan UMKM adalah terkait transparansi data yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kreatif pengembangan UMKM pada desa wisata di Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan baik dilihat dari jumlah presentasi kemiskinan secara signifikan. Peneliti menemukan temuan penting dimana meskipun implementasi telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan turunnya presentase kemiskinan sepanjang tahun 2020 hingga 2022, namun angka presentase kemiskinan masih tinggi dan jauh di atas rata-rata nasional. Padahal Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi UMKM Desa Wisata yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan yang menyebabkan jumlah presentase kemiskinan masih tinggi di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, peneliti menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku UMKM sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan karena UMKM membantu penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan temuan yang dilakukan (Masrun, 2020) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam mengatasi kemiskinan di suatu daerah.

Sama hal lainnya dengan penelitian lainnya, penelitian ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki yang dalam hal ini adalah masyarakat, layaknya dalam penelitian yang dilakukan (Wahyu, 2018) yang mengatakan bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam optimalisasi implementasi kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu pengembangan UMKM dengan konsep ekonomi kreatif telah dilaksanakan dengan baik pada

desa wisata di Kabupaten Lombok Barat. Adanya desa wisata menyebabkan potensi pengembangan UMKM lebih besar karena kondisi desa wisata yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Meskipun demikian, jumlah presentase penduduk miskin masih tinggi. Tingginya presentase kemiskinan yang masih terjadi meskipun telah diterapkannya kebijakan penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang menyebabkan masih tingginya presentase kemiskinan dengan jumlah penurunan yang signifikan namun angkanya masih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa faktor yang menghambat jalannya implementasi adalah respon masyarakat seperti proses produksi dan distribusi, mindset masyarakat, pemahaman teknologi, penyebab kemiskinan lain seperti kurangnya lapangan pekerjaan, legalitas, kurangnya SDM, dan kelembagaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu penelitian dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penulisan yang dilakukan, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM berbasis ekonomi kreatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Sub Bagian Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Creswell, J W, & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ>

Kumar, R. (2011). *Research Methodology. 3 thEditon*. Los Angeles: SAGE.

Royat, Sujana. 2015. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan. Jakarta.

Setyosari, P. (2013). Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan. Prenadamedia Group.

Suryana. 2013. Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang. Jakarta: Salemba Empat.

Sutarmin.2016. Implementasi Kebijakan Program Ekonomi. Unpas.

Tosun dan Leininger. 2017. *Governing the Interlinkages between the Sustainable Development Goals: Approaches to Attain Policy Integration.Global Challenges* 1(1): 1-12.

Yacoub, Y. 2010. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos (8) :25.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=yacoub+pengaruh+tingkat+pengangguran&btnG=#d=gs_qabs&t=1717489816692&u=%23p%3DA-HTLUBC2B8J

Zulfan dkk.2020.Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Planoearth 5(1):1-6.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=zulfan+peran+pemerintah+dalam&btnG=#d=gs_qabs&t=1717489864196&u=%23p%3DNkg9uTO4EfAJ

